

**PERBANDINGAN INDIKATOR  
KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA TENGAH  
ANTARA TAHUN 2008 - 2009**

**SIGIT HENDRARYADI**

**Drs. DUL MUID, M.Si, Akt**

**ABSTRACT**

*This research is aimed to know the comparison of financial performance of local government of Central Java in 2008 and 2009; to know whether there are some differences in evaluation of financial performance of local Government of Central Java based on capability indicator, effectiveness and activity of local financial performance of 35 regencies. The research analyzes the financial performance of local government as well, and examines the differences in both 2008 and 2009. Null hypothesis in this research refers to no differences between the financial performance of the local government of Central Java in 2008 and in 2009.*

*Data used in this research were secondary data from financial reports of 35 local governments of Central Java in 2008 and 2009 in which those financial reports have been examined by Badan Pemeriksa Keuangan and those Laporan Hasil Pemeriksaan have been published. Data were taken from [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), the official situs of BPK. Analysis technique used in this research was capability of local financial analysis, local financial effectiveness analysis and local financial activity analysis. Paired sample t-test was used to test the hypothesis of research.*

*Result shows that Magelang has the highest rank of financial performance (53,75%) and Pekalongan has the lowest rank (42,30%). The result of capability analysis shows that Semarang has the highest rank (19,50%) and Demak has the lowest rank (5,47). The result of effectiveness shows that Magelang has the highest rank (119,82%) and Pekalongan has the lowest rank (91,16%). The result of local financial activity shows that Magelang has the lowest ratio of financial activity and Salatiga has the highest ratio of financial activity. While the result of Kolmogorof-Smirnov test shows that asymp score is  $< 0,05$ . It means that there is significant difference of financial performance of local government of Central Java in 2008 and 2009.*

*Key words : Financial Performance, capability, effectiveness and activity of Pemda's financial.*

## **PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan keinginan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja Pemerintah Daerah yang semakin besar dan kritis terutama semenjak era reformasi yang melahirkan Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/ 1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Republik Indonesia” merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk kemudian, UU No. 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Halim (2001 : 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun, pada kenyataannya hampir semua daerah masih menggantungkan bantuan Pemerintah Pusat baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

## **LANDASAN TEORI**

### **Keuangan Daerah**

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Usman (1998: 63) mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan

“*self supporting*” dalam bidang keuangan. Halim (2007: 230) mengungkapkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya (Susantih dan Saftiana, 2010:5). Menurut Kunuarjo (1996: 181) bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah.

### **Konsep *Value For Money***

Salah satu tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan konsep *value for money* dalam aktivitas organisasi sektor publik. Menurut Haryanto dkk (2007: 8), *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan aktivitas.

- a. Ekonomi : Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
- b. Efisiensi : Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
- c. Efektivitas : Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak

tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi,1986: 199).

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

### **Analisis Rasio Keuangan**

.Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231). Pengertian analisis keuangan itu sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya. Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial, sedangkan penggunaannya pada lembaga publik khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Susantih dan Saftiana, 2010:6). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007: 223) yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian.

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Data

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dengan pertimbangan selama ini masih jarang peneliti melakukan penelitian secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara tahun 2008 dan 2009. Kedua variabel bersifat korelasi. Masing-masing variabel dianalisis dengan menggunakan tiga indikator kinerja yaitu kemandirian daerah, efektifitas dan aktivitas.

### Analisis kemandirian

Analisis kemandirian daerah menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007: 128). Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rumusan rasio kemandirian daerah yaitu :

$$\text{Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i}$$

Keterangan  $i$  = Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Selanjutnya kriteria kemampuan daerah dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio kemandiriannya diatas 50 persen, baik jika nilai rasio kemandiriannya lebih dari 40 persen sampai dengan 50 persen, cukup jika nilai rasio lebih dari 30 persen sampai dengan 40 persen, sedang jika nilai rasio lebih dari 20 persen sampai dengan 30 persen, kurang jika nilai rasio lebih dari 10 sampai dengan 20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio 0 persen sampai dengan 10 persen.

### Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas adalah kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan (Mahmudi: 2007: 129). Rumusan rasio efektifitas yaitu :

$$\text{Efektifitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i}$$

Keterangan  $i$  = Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektifitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

### **Analisis Aktivitas Keuangan**

Analisis aktivitas keuangan daerah adalah bagaimana Pemda memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya. Analisis aktivitas diklasifikasikan menjadi 2 analisa rasio yaitu analisa rasio keserasian dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*.

#### **a. Rasio Keserasian**

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pegawai dan belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah/belanja pegawai berarti persentase belanja pelayanan publik (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Susantih dan Saftiana, 2010:13).

Selanjutnya pada penelitian ini secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Aparatur Daerah terhadap APBD } i = \frac{\text{Belanja Pegawai daerah terhadap APBD } i}{\text{Total APBD } i}$$

$$\text{Belanja Pelayanan Publik terhadap APBD } i = \frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik } i}{\text{Total APBD } i}$$

Keterangan  $i$  = Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Karena belum ada tolok ukur yang jelas mengenai rasio keserasiaan pemerintah daerah saat ini maka untuk membandingkan rasio keserasian pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, pada penelitian ini dilakukan

penghitungan rata-rata belanja pegawai dan belanja pelayanan publik selama tahun penelitian.

**b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

Analisis DSCR untuk melihat kemampuan pemda dalam menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, nilai DSCR minimal 2,5. Rumusan untuk menghitung DSCR adalah sebagai berikut :

$$DSCR_i = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}$$

Keterangan :

DSCR *i* = Debt Service Coverage Ratio Pemerintah Daerah se Jawa Tengah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah merupakan hak daerah atas penerimaan yang disetorkan kepada pemerintah pusat/provinsi seperti PBB, BPHTB, Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan.

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib merupakan jenis belanja daerah yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung serta Pembayaran Utang Pokok.

**Populasi dan Sampel**

Penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, yaitu Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah adalah sebanyak 35 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 (enam) pemerintah kota, dan 29 pemerintah kabupaten.

Teknik pengambilan sampel (*sampling*) dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan pertimbangan (*judgment purposive sampling*), yaitu tipe pemilihan sampel tidak secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Supomo dan Indrianto, 2002, dalam Ratna, 2006).

Syarat yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah menyusun laporan keuangan tahun antara tahun 2008 dan 2009;
2. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun antara tahun 2008 dan 2009 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan semester pertama tahun 2010;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 dan 2009 telah dipublikasikan melalui *website* resmi BPK.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan rekaman historis mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2008 - 2009. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini berupa laporan keuangan yang telah diperiksa / diaudit oleh BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya telah dipublikasikan.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat pendugaan (*inference*) atas suatu teks (Weber dalam Utomo, 1992). Teks yang ada dikondifikasikan ke dalam beberapa kelompok atau kategori berdasarkan kriteria tertentu (Weber dalam Utomo, 1998).

Prosedur analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemetaan indikator kinerja laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada bagian pertama, dengan menggunakan instrumen penelitian (hasil analisa laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan tiga indikator kinerja keuangan yaitu kemandirian daerah, efektifitas dan aktivitas), dilakukan penelusuran laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel untuk mencari besaran nilai perbandingan kinerja dan perubahan kinerja antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dari hasil penelusuran tersebut akan dipetakan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 2. Analisis statistik uni-varian

Analisis statistik uni-varian dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan deskripsi mengenai data yang diperoleh. Dari analisis statistik uni-varian ini akan diperoleh mean, nilai terendah, dan nilai tertinggi, serta standar deviasi dari data yang diolah.

## 3. Analisis statistik bivarian

Analisis statistik dalam penelitian ini ditujukan untuk menguji hipotesis yang ada. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis itu (Hasan, 2002, dalam Ratna 2006). Prosedur pengujian statistik adalah langkah-langkah yang dipergunakan untuk menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut.

Prosedur analisis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Uji Normalitas

Uji hipotesis yang diperlukan untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Jika data terdistribusi secara normal, maka dipergunakan uji statistik parametrik dan jika tidak terdistribusi secara normal, maka dipergunakan uji statistik non parametrik. Uji normalitas menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*.

### 2) Menentukan formulasi hipotesis.

#### a) Hipotesis nol atau hipotesis nihil.

Hipotesis nol atau hipotesis nihil merupakan hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis ini disebut hipotesis nol atau hipotesis nihil karena tidak mempunyai perbedaan. Hipotesis nol dilambangkan dengan  $H_0$ . Dalam penelitian ini telah dirumuskan hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu:

“Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara tahun 2008 dan 2009”.

#### b) Hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan.

Hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan merupakan hipotesis yang dirumuskan sebagai tandingan atau lawan dari hipotesis nol ( $H_0$ ).

Hipotesis alternatif dilambangkan dengan  $H_a$ . Dalam penelitian ini telah dirumuskan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yaitu:

“Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara tahun 2008 dan 2009”.

3) Menentukan taraf nyata (*significant level*) dan menentukan nilai tabel.

Taraf nyata adalah besarnya batasan toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi dalam pengujian. Dalam penelitian ini menggunakan  $\alpha = 5\%$ .

4) Uji statistik.

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, instrumen statistik yang dipergunakan untuk menguji dua kelompok data yang jelas mempunyai korelasi adalah *paired t-test* dengan taraf signifikansi 0,05 dalam pengujian dua arah. Sedangkan untuk menguji dua kelompok data yang mempunyai korelasi dan tidak memenuhi asumsi normalitas digunakan uji *Wilcoxon* dengan taraf signifikansi 0,05 dalam pengujian dua arah.

5) Membuat kesimpulan.

Kesimpulan diambil dengan melihat hasil analisis statistik yang dilakukan. Kesimpulan yang diambil merupakan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah disusun berdasarkan hasil analisis statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada tabel dapat dilihat bahwa untuk tahun anggaran 2008, Kab. Demak memiliki nilai kemandirian paling rendah yaitu sebesar 4,81% meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 6,13% dengan peringkat 33. Sedangkan pada tahun 2009 Kota Pekalongan memiliki nilai kemandirian paling rendah yaitu sebesar 5,98% meskipun sebenarnya sudah mengalami peningkatan dari sebesar 5,90% saja pada tahun 2008.

Hasil perbandingan dalam dua tahun anggaran menunjukkan signal positif, dimana secara rata-rata terjadi peningkatan nilai kemandirian keuangan daerah dari tahun anggaran 2008 sebesar 7,89% ke tahun anggaran 2009 sebesar 8,83%. Hal ini tentunya menjadi pertanda yang baik bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 4.1

### Analisa Rasio Kemandirian

No	Kabupaten/Kota	Kemandirian		Kategori		Peringkat		Keterangan
		2009	2008	2009	2008	2009	2008	
1	Kota Semarang	18.94	20.06	Kurang	Sedang	1	1	Menurun
2	Kota Salatiga	11.20	9.11	Kurang	Sangat Kurang	6	7	Meningkat
3	Kab. Semarang	12.10	9.75	Kurang	Sangat Kurang	5	5	Meningkat
4	Kab. Kendal	8.51	8.50	Sangat Kurang	Sangat Kurang	14	9	Meningkat
5	Kab. Demak	6.13	4.81	Sangat Kurang	Sangat Kurang	33	35	Meningkat
6	Kab. Grobogan	6.01	5.90	Sangat Kurang	Sangat Kurang	34	27	Meningkat
7	Kab. Kudus	8.68	7.79	Sangat Kurang	Sangat Kurang	13	13	Meningkat
8	Kab. Jepara	9.41	7.80	Sangat Kurang	Sangat Kurang	10	12	Meningkat
9	Kab. Pati	8.23	6.80	Sangat Kurang	Sangat Kurang	16	20	Meningkat
10	Kab. Rembang	9.70	8.22	Sangat Kurang	Sangat Kurang	9	11	Meningkat
11	Kab. Blora	7.00	6.43	Sangat Kurang	Sangat Kurang	26	25	Meningkat
12	Kota Surakarta	13.81	13.83	Kurang	Kurang	3	3	Menurun
13	Kota Magelang	13.16	9.67	Kurang	Sangat Kurang	4	6	Meningkat
14	Kab. Sukoharjo	6.50	6.49	Sangat Kurang	Sangat Kurang	30	23	Meningkat
15	Kab. Wonogiri	7.38	5.34	Sangat Kurang	Sangat Kurang	21	33	Meningkat
16	Kab. Karanganyar	8.90	7.58	Sangat Kurang	Sangat Kurang	12	14	Meningkat
17	Kab. Sragen	7.66	7.04	Sangat Kurang	Sangat Kurang	19	18	Meningkat
18	Kab. Klaten	6.19	5.42	Sangat Kurang	Sangat Kurang	32	32	Meningkat
19	Kab. Boyolali	7.93	7.22	Sangat Kurang	Sangat Kurang	18	16	Meningkat

20	Kab. Magelang	8.38	9.03	Sangat Kurang	Sangat Kurang	15	8	Menurun
21	Kab. Temanggung	6.91	6.49	Sangat Kurang	Sangat Kurang	27	22	Meningkat
22	Kab. Wonosobo	7.38	5.58	Sangat Kurang	Sangat Kurang	22	30	Meningkat
23	Kab. Kebumen	7.08	6.59	Sangat Kurang	Sangat Kurang	25	21	Meningkat
24	Kab. Purworejo	6.66	5.87	Sangat Kurang	Sangat Kurang	29	29	Meningkat
25	Kota Pekalongan	5.98	5.90	Sangat Kurang	Sangat Kurang	35	28	Meningkat
26	Kota Tegal	16.71	15.83	Kurang	Kurang	2	2	Meningkat
27	Kab. Pekalongan	7.35	6.43	Sangat Kurang	Sangat Kurang	23	26	Meningkat
28	Kab. Brebes	6.74	5.30	Sangat Kurang	Sangat Kurang	28	34	Meningkat
29	Kab. Tegal	8.13	6.80	Sangat Kurang	Sangat Kurang	17	19	Meningkat
30	Kab. Pemasang	7.54	7.55	Sangat Kurang	Sangat Kurang	20	15	Menurun
31	Kab. Batang	6.37	5.44	Sangat Kurang	Sangat Kurang	31	31	Meningkat
32	Kab. Banyumas	10.20	9.87	Kurang	Sangat Kurang	7	4	Meningkat
33	Kab. Purbalingga	9.88	8.41	Sangat Kurang	Sangat Kurang	8	10	Meningkat
34	Kab. Banjarnegara	7.24	6.46	Sangat Kurang	Sangat Kurang	24	24	Meningkat
35	Kab. Cilacap	9.22	7.05	Sangat Kurang	Sangat Kurang	11	17	Meningkat
	Rata-rata	8.83	7.89	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Meningkat

### **Rasio Efektifitas**

Tabel di bawah menunjukkan bahwa peringkat tertinggi rasio efektivitas pada tahun 2009 adalah Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 133,41% yang meningkat drastis dari tahun 2008 yaitu sebesar 88,34% yang merupakan peringkat ke-33. Rasio efektivitas terendah pada tahun 2009 dialami oleh Kabupaten Magelang yaitu sebesar 88,71% yang menurun drastis dari tahun 2008 yaitu sebesar 107,30%.

Pada tahun 2008 peringkat tertinggi diperoleh Kabupaten Blora yaitu sebesar 134,11% meskipun kemudian menurun drastis pada tahun 2009 menjadi 100,26% meskipun klasifikasinya masih masuk sangat efektif. Peringkatnya juga turun drastis dari 1 menjadi peringkat 27. Sedangkan rasio efektivitas terburuk pada tahun 2008 terjadi di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 84,31% yang kemudian meningkat drastis pada tahun 2009 menjadi sebesar 108,98% yang masuk klasifikasi sangat efektif dan berada di peringkat 16.

Hasil analisa menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah cukup mampu untuk merealisasikan target PAD yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Hasil yang cukup menggembirakan bagi penilaian kinerja

keuangan pemerintah daerah. Hampir semua daerah mampu merealisasikan target pendapatan di atas 80 persen dari target penerimaan atau dengan kata lain mempunyai penilaian klasifikasi cukup efektif sampai sangat efektif

**Tabel 4.2**  
**Analisa Rasio Efektivitas**

No	Kabupaten/Kota	Efektivitas		Klasifikasi		Peringkat		Keterangan
		2009	2008	2009	2008	2009	2008	
1	Kota Semarang	99.56	92.87	Efektif	Efektif	28	29	Meningkat
2	Kota Salatiga	103.34	102.49	Sangat efektif	Sangat efektif	23	15	Meningkat
3	Kab. Semarang	117.99	99.01	Sangat efektif	Efektif	8	19	Meningkat
4	Kab. Kendal	108.66	90.91	Sangat efektif	Efektif	17	31	Meningkat
5	Kab. Demak	119.41	96.90	Sangat efektif	Efektif	6	23	Meningkat
6	Kab. Grobogan	95.48	103.82	Efektif	Sangat efektif	31	14	Menurun
7	Kab. Kudus	115.01	97.31	Sangat efektif	Efektif	10	20	Meningkat
8	Kab. Jepara	118.15	94.37	Sangat efektif	Efektif	7	27	Meningkat
9	Kab. Pati	111.65	94.06	Sangat efektif	Efektif	11	28	Meningkat
10	Kab. Rembang	108.98	84.31	Sangat efektif	Cukup efektif	16	35	Meningkat
11	Kab. Blora	100.26	134.11	Sangat efektif	Sangat efektif	27	1	Menurun
12	Kota Surakarta	102.12	100.06	Sangat efektif	Sangat efektif	25	18	Meningkat
13	Kota Magelang	132.06	107.59	Sangat efektif	Sangat efektif	2	8	Meningkat
14	Kab. Sukoharjo	95.24	104.35	Efektif	Sangat efektif	32	12	Menurun
15	Kab. Wonogiri	133.41	88.34	Sangat efektif	Cukup efektif	1	33	Meningkat
16	Kab. Karanganyar	107.33	101.19	Sangat efektif	Sangat efektif	19	17	Meningkat
17	Kab. Sragen	96.70	97.06	Efektif	Efektif	30	22	Menurun
18	Kab. Klaten	104.76	114.45	Sangat efektif	Sangat efektif	21	5	Menurun
19	Kab. Boyolali	110.07	113.18	Sangat efektif	Sangat efektif	14	6	Menurun
20	Kab. Magelang	88.71	107.30	Cukup efektif	Sangat efektif	35	9	Menurun
21	Kab. Temanggung	99.07	95.35	Efektif	Efektif	29	25	Meningkat
22	Kab. Wonosobo	129.83	107.89	Sangat efektif	Sangat efektif	3	7	Meningkat
23	Kab. Kebumen	103.03	96.62	Sangat efektif	Efektif	24	24	Meningkat
24	Kab. Purworejo	109.03	90.21	Sangat efektif	Efektif	15	32	Meningkat
25	Kota Pekalongan	94.20	88.12	Efektif	Cukup efektif	33	34	Meningkat
26	Kota Tegal	100.53	91.14	Sangat efektif	Efektif	26	30	Meningkat
27	Kab. Pekalongan	106.13	118.90	Sangat efektif	Sangat efektif	20	3	Menurun
28	Kab. Brebes	129.13	122.08	Sangat efektif	Sangat efektif	4	2	Meningkat
29	Kab. Tegal	115.70	94.78	Sangat efektif	Efektif	9	26	Meningkat
30	Kab. Pemasang	92.78	106.11	Efektif	Sangat efektif	34	11	Menurun
31	Kab. Batang	110.70	106.44	Sangat efektif	Sangat efektif	13	10	Meningkat
32	Kab. Banyumas	103.49	97.22	Sangat efektif	Efektif	22	21	Meningkat
33	Kab. Purbalingga	111.35	116.77	Sangat efektif	Sangat efektif	12	4	Menurun
34	Kab. Banjarnegara	107.75	104.16	Sangat efektif	Sangat efektif	18	13	Meningkat

35	Kab. Cilacap	128.52	102.43	Sangat efektif	Sangat efektif	5	16	Meningkat
	Rata-rata	108.86	101.77	Sangat efektif	Sangat efektif			Meningkat

### **Rasio Keserasian**

Tabel 4.3 di bawah menunjukkan bahwa peringkat tertinggi rasio keserasian untuk belanja pegawai pada tahun 2009 adalah Kabupaten Kebumen yang meningkat dari peringkat 11 pada tahun 2008 yaitu sebesar 77,14% yang meningkat dari 64,37% pada tahun 2008. Peringkat terendah dialami oleh Kabupaten Pekalongan yaitu sebesar 54,94% yang juga merupakan peringkat terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar 49,67%. Sedangkan peringkat tertinggi pada tahun 2008 adalah Kabupaten Pekalongan yaitu sebesar 72,87% yang kemudian turun menjadi sebesar 68,60% pada tahun 2009 dan menjadi peringkat ke-13.

Belanja pegawai yang begitu besar disebabkan karena pemerintah daerah setiap tahunnya mengadakan rekrutmen pegawai baru melalui jalur umum dan adanya pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi pegawai pemerintah daerah. Hal lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan rasio belanja pegawai yaitu gaji pegawai yang terus meningkat tiap tahunnya namun besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mencukupi untuk menutup peningkatan belanja pegawai

Rasio keserasian belanja publik yang tertinggi pada tahun 2009 adalah Kota Salatiga yaitu sebesar 41,00% yang juga merupakan peringkat tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 38,36%. Rasio keserasian belanja publik terendah pada tahun 2009 adalah Kabupaten Pemasang yaitu sebesar 11,06% yang menurun dari tahun 2008 yaitu sebesar 20,56% dengan peringkat 20. Sedangkan rasio keserasian belanja publik terendah pada tahun 2008 adalah Kabupaten Batang yaitu sebesar 13,70% yang kemudian meningkat menjadi 15,60% pada tahun 2009 dan menjadi peringkat ke-23.

Penekanan lain dapat kita lihat dari alokasi belanja pelayanan publik/belanja modal. Perbandingan selama dua tahun anggaran menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi penurunan rasio belanja pelayanan publik/belanja modal yang pada

tahun anggaran 2008 sebesar 21,14% menjadi 18,43% di tahun anggaran 2009. Jelas jumlah yang tidak seimbang dibanding dengan besarnya jumlah belanja pegawai dalam APBD Pemda.

**Tabel 4.3**  
**Analisa Rasio Keserasian**

No	Kabupaten/Kota	Keserasian									
		Belanja Pegawai		Peringkat		Keterangan	Belanja Publik		Peringkat		Keterangan
		2009	2008	2009	2008		2009	2008	2009	2008	
1	Kota Semarang	63.08	57.20	24	25	Meningkat	20.04	13.91	10	34	Meningkat
2	Kota Salatiga	61.08	52.51	27	33	Meningkat	41.00	38.36	1	1	Meningkat
3	Kab. Semarang	67.41	65.03	18	10	Meningkat	14.95	19.31	26	23	Menurun
4	Kab. Kendal	69.23	63.86	12	13	Meningkat	18.22	22.49	14	12	Menurun
5	Kab. Demak	65.22	57.10	21	26	Meningkat	15.15	22.05	25	14	Menurun
6	Kab. Grobogan	67.93	63.69	16	14	Meningkat	18.14	24.78	15	7	Menurun
7	Kab. Kudus	56.32	55.29	33	29	Meningkat	27.77	20.78	3	19	Meningkat
8	Kab. Jepara	58.69	53.93	30	32	Meningkat	16.56	22.00	19	15	Menurun
9	Kab. Pati	60.40	57.92	28	23	Meningkat	25.07	16.45	5	27	Meningkat
10	Kab. Rembang	62.66	54.87	26	30	Meningkat	16.66	22.85	17	11	Menurun
11	Kab. Blora	64.05	56.39	22	27	Meningkat	13.08	21.50	32	17	Menurun
12	Kota Surakarta	62.68	51.35	25	34	Meningkat	25.55	33.42	4	2	Menurun
13	Kota Magelang	56.84	61.76	32	18	Menurun	24.64	24.31	6	8	Meningkat
14	Kab. Sukoharjo	72.79	64.02	4	12	Meningkat	20.23	22.35	9	13	Menurun
15	Kab. Wonogiri	73.65	68.39	3	2	Meningkat	13.09	16.04	31	31	Menurun
16	Kab. Karanganyar	60.07	59.53	29	21	Meningkat	21.66	26.03	7	4	Menurun
17	Kab. Sragen	71.04	65.68	9	8	Meningkat	14.19	15.46	28	33	Menurun
18	Kab. Klaten	63.26	55.31	23	28	Meningkat	15.30	21.80	24	16	Menurun
19	Kab. Boyolali	72.03	61.99	8	16	Meningkat	16.66	17.60	18	25	Menurun
20	Kab. Magelang	74.68	66.51	2	7	Meningkat	11.39	15.87	34	32	Menurun
21	Kab. Temanggung	72.04	63.62	7	15	Meningkat	13.32	17.55	30	26	Menurun
22	Kab. Wonosobo	72.12	67.36	6	4	Meningkat	13.94	17.99	29	24	Menurun
23	Kab. Kebumen	77.14	64.37	1	11	Meningkat	15.76	16.26	22	29	Menurun
24	Kab. Purworejo	72.75	67.29	5	5	Meningkat	16.02	19.91	21	21	Menurun
25	Kota Pekalongan	54.94	49.67	35	35	Meningkat	18.70	20.93	12	18	Menurun
26	Kota Tegal	56.32	57.64	34	24	Menurun	32.99	24.29	2	9	Meningkat
27	Kab. Pekalongan	68.60	72.87	13	1	Menurun	18.51	16.12	13	30	Meningkat
28	Kab. Brebes	57.07	54.24	31	31	Meningkat	19.34	26.93	11	3	Menurun
29	Kab. Tegal	69.96	65.07	10	9	Meningkat	14.95	19.31	27	22	Menurun
30	Kab. Pemasang	67.50	61.18	17	20	Meningkat	11.06	20.56	35	20	Menurun
31	Kab. Batang	68.17	58.99	14	22	Meningkat	15.60	13.70	23	35	Meningkat
32	Kab. Banyumas	69.74	67.41	11	3	Meningkat	11.41	16.28	33	28	Menurun
33	Kab. Purbalingga	65.90	61.58	19	19	Meningkat	20.72	24.81	8	5	Menurun

34	Kab. Banjarnegara	65.55	61.98	20	17	Meningkat	16.54	23.19	20	10	Menurun
35	Kab. Cilacap	68.11	67.24	15	6	Meningkat	17.14	24.80	16	6	Menurun
	Rata-rata	65.97	60.94			Meningkat	18.44	21.14			Menurun

### Debt Service Coverage Ratio

Analisis DSCR untuk melihat kemampuan pemda dalam menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman. Tidak semua daerah mempunyai rasio DSCR pada kedua periode penelitian seperti tampak pada tabel 4.4 di bawah. Hanya terdapat 25 daerah yang mempunyai rasio DSCR pada kedua periode atau terdapat 10 daerah yang tidak mempunyai rasio DSCR secara lengkap pada tahun 2008 dan tahun 2009.

Hasil analisa menunjukkan bahwa tidak sedikit daerah yang masih mampu untuk membiayai pengeluarannya atau pemda tidak perlu untuk melakukan pinjaman. Hal ini mungkin disebabkan selain prosedur melakukan pinjaman yang cukup sulit, karena melalui Kementerian Keuangan, tetapi juga harus dengan persetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya memang menggunakan alternatif ini merupakan prosedur yang sifatnya pinjaman produktif atau dengan kata lain pinjaman yang mempunyai nilai manfaat untuk menghasilkan aset bagi pemda.

**Tabel 4.4**  
**Analisa Rasio DSCR**

No	Kabupaten/Kota	DSCR		Peringkat		Keterangan
		2009	2008	2009	2008	
1	Kota Semarang	354.92	67.05	10	20	Meningkat
2	Kota Salatiga					
3	Kab. Semarang	7,053.66	8,639.54	3	1	Menurun
4	Kab. Kendal	414.01	629.61	8	9	Menurun
5	Kab. Demak	21,749.81		2		
6	Kab. Grobogan	3.56	20.20	31	26	Menurun
7	Kab. Kudus	130.20	2,761.74	13	2	Menurun
8	Kab. Jepara	84,385.87		1		
9	Kab. Pati	79.68	28.62	14	24	Meningkat
10	Kab. Rembang	8.67	1,480.35	30	5	Menurun
11	Kab. Blora	1,026.86	1,251.85	5	7	Menurun

12	Kota Surakarta	43.35	32.73	23	23	Meningkat
13	Kota Magelang					
14	Kab. Sukoharjo	74.29	62.46	15	22	Meningkat
15	Kab. Wonogiri	31.69	71.92	25	18	Menurun
16	Kab. Karanganyar	23.10	27.87	28	25	Menurun
17	Kab. Sragen	35.23		24		
18	Kab. Klaten	45.42		22		
19	Kab. Boyolali	65.55	2,170.11	16	3	Menurun
20	Kab. Magelang	55.80	71.48	19	19	Menurun
21	Kab. Temanggung	184.09	115.25	12	16	Meningkat
22	Kab. Wonosobo					
23	Kab. Kebumen	53.72	1,376.91	21	6	Menurun
24	Kab. Purworejo	29.13	784.33	26	8	Menurun
25	Kota Pekalongan	927.21		6		
26	Kota Tegal	236.55	204.07	11	14	Meningkat
27	Kab. Pekalongan	396.35	507.25	9	12	Menurun
28	Kab. Brebes	26.59	148.93	27	15	Menurun
29	Kab. Tegal	756.95	459.06	7	13	Meningkat
30	Kab. Pemalang	61.90	67.02	17	21	Menurun
31	Kab. Batang	56.80	581.04	18	10	Menurun
32	Kab. Banyumas	55.23		20		
33	Kab. Purbalingga	18.74	109.85	29	17	Menurun
34	Kab. Banjarnegara		545.18		11	
35	Kab. Cilacap	1,936.94	1,857.98	4	4	Meningkat
	Rata-rata	3,881.35	925.86			Meningkat

## Uji Normalitas

**Tabel 4.6**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	N	Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Most Extreme Differences			Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Absolute	Positive	Negative		
Kemandirian 2009	35	8.83	2.99	.178	.178	-.170	1.052	.219
Kemandirian 2008	35	7.90	3.11	.198	.198	-.173	1.172	.128
Efektivitas 2009	35	108.86	11.69	.120	.120	-.097	.710	.695
Efektivitas 2008	35	101.77	10.67	.119	.119	-.072	.705	.703
Belanja Aparatur Daerah 2009	35	65.97	5.96	.110	.075	-.110	.648	.795
Belanja Aparatur Daerah 2008	35	60.94	5.57	.113	.077	-.113	.671	.759
Belanja Pelayanan Publik 2009	35	18.44	6.23	.169	.169	-.118	1.000	.270
Belanja Pelayanan Publik 2008	35	21.14	5.17	.125	.125	-.079	.739	.646
DSCR 2009	31	3881.35	15474.29	.453	.453	-.401	2.523	.000
DSCR 2008	26	925.86	1743.87	.302	.263	-.302	1.539	.018

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang mempunyai signifikansi di bawah 0,05 adalah data rasio DSCR pada tahun 2009 (0,000) dan DSCR tahun 2008 (0,018). Berarti kedua data tersebut tidak terdistribusi secara normal dan dikenakan statistik non parametrik. Sedangkan data yang lain mempunyai signifikansi di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa telah terdistribusi secara normal dan dapat dikenai statistik parametrik.

## Uji Hipotesis Parametrik

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Hipotesis Parametrik**

### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Kemandirian 2009 - Kemandirian 2008	8.8346	35	2.98687	.50487
Pair 2	Efektivitas 2009 - Efektivitas 2008	108.8609	35	11.69050	1.97605
Pair 3	Belanja Aparatur Daerah 2009 - Belanja Aparatur Daerah 2008	65.9720	35	5.96477	1.00823
Pair 4	Belanja Pelayanan Publik 2009 - Belanja Pelayanan Publik 2008	18.4386	35	6.23036	1.05312
		21.1426	35	5.17278	.87436

### Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Kemandirian 2009 - Kemandirian 2008	.9386	.91077	.15395	.6257	1.2514	6.097	34	.000
Pair 2	Efektivitas 2009 - Efektivitas 2008	7.0923	15.63141	2.64219	1.7227	12.4619	2.684	34	.011
Pair 3	Belanja Aparatur Daerah 2009 - Belanja Aparatur Daerah 2008	5.0337	3.96183	.66967	3.6728	6.3947	7.517	34	.000
Pair 4	Belanja Pelayanan Publik 2009 - Belanja Pelayanan Publik 2008	-2.7040	4.81597	.81405	-4.3583	-1.0497	-3.322	34	.002

Tampak bahwa signifikansi adalah sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kemandirian tahun 2009 dengan rasio kemandirian tahun 2008. Pasangan data yang kedua adalah antara rasio efektivitas tahun 2009 dengan rasio efektivitas tahun 2008. Tampak bahwa signifikansi adalah sebesar 0,011 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efektivitas tahun 2009 dengan rasio efektivitas tahun 2008. Rata-rata rasio efektivitas tahun 2009 adalah sebesar 108,8609 dan tahun 2008 adalah sebesar 101,7686. Dengan demikian tampak bahwa rasio efektivitas tahun 2009 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan rasio efektivitas tahun 2008.

Pasangan data yang ketiga adalah antara rasio keserasian belanja aparatur daerah tahun 2009 dengan rasio keserasian belanja aparatur daerah tahun 2008. Tampak bahwa signifikansi adalah sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio keserasian belanja aparatur daerah tahun 2009 dengan rasio keserasian belanja aparatur daerah tahun 2008. Pasangan data yang keempat adalah antara rasio keserasian belanja publik tahun 2009 dengan rasio keserasian belanja publik tahun 2008. Tampak bahwa signifikansi adalah sebesar 0,002 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio keserasian belanja publik tahun 2009 dengan rasio keserasian belanja publik tahun 2008.

### Uji Hipotesis Non Parametrik

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Hipotesis Non Parametrik**

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
DSCR 2008 - DSCR 2009	Negative Ranks	8 <sup>a</sup>	9.88	79.00
	Positive Ranks	17 <sup>b</sup>	14.47	246.00
	Ties	0 <sup>c</sup>		
	Total	25		

a. DSCR 2008  $<$  DSCR 2009

b. DSCR 2008  $>$  DSCR 2009

c. DSCR 2008 = DSCR 2009

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	DSCR 2008 - DSCR 2009
Z	-2.247 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.025

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Tampak bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,025 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio DSCR tahun 2009 dengan rasio DSCR pada tahun 2008. Dari 25 daerah, terdapat 8 daerah dengan DSCR 2008 di bawah DSCR 2009 dan terdapat 17 daerah dengan DSCR 2008 lebih tinggi dari pada DSCR tahun 2009. Dengan demikian, tampak bahwa rasio DSCR 2008 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan rasio DSCR tahun 2009.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diberikan; 1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kemandirian tahun 2009 dengan tahun 2008; 2) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efektivitas tahun 2009 dengan tahun 2008; 3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio keserasian belanja aparatur daerah tahun 2009 dengan tahun 2008; 3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio keserasian belanja publik tahun 2009 dengan tahun 2008; 4) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio DSCR tahun 2009 dengan tahun 2008.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain ;1) Penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah saja sehingga hasil penelitian belum bisa mencerminkan praktik kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia; 2) Penelitian ini hanya dilakukan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam dua tahun sehingga tidak bisa dilakukan analisis tren; 3) Terbatasnya data yang diperoleh oleh peneliti karena beberapa dokumen sulit ditelusuri keberadaannya.

Beberapa saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu ;1) Penelitian ini hanya menggunakan periode dua tahun saja, sehingga disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan periode yang lebih panjang. 2) Pengukuran kinerja keuangan daerah hendaknya dapat dijadikan rekomendasi atas pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik; 3) Untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang maksimal meningkatkan usaha pemungutan pendapatan asli daerah secara lebih intensif dan aktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darumurti, K.D dan Rauta, Umbu. 2000. Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok. *Kritis*. Vol. XII, No. 3, 1 - 53.
- Devas Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI – Press.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI – Press.
- Erwansyah. 2003. Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Kinerja Keuangan dan Rasio Harga Saham Perusahaan Publik Kelompok Jakarta Islamic Index. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heny Susantih dan Yulia Saftiana. 2010. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi se Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XII Ikatan Akuntan Indonesia*.

- Hirawan, Susiati B. 1990. "Keleluasaan daerah atau kontrol pusat?", dalam Arsyad Anwar dan Iwan Jaya Azis (Editor). *Bunga Rampai Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kaho, Yosef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kuncoro, Haryo. 2007. "Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi X Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lindawati, Tita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah DKI Jakarta dalam Melakukan Pinjaman. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mamesah, D. J.,. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, Richard A, dan Peggy Musgrave. 1993. *Public Finance in The Theory and Practice*. Tokyo: MC-Graw Hill Kogakusha
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Pasrah, Rudi. 2007. Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Kajian Ekonomi*. Vol 6 No.2, 198-221.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Riphat Singgih dan Parluhutan Hutahaean. 1997. Strategi Pemantapan Keuangan Daerah dan Kebijakan Desentralisasi : Suatu Analisis tentang Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Vol. 4 No. 2, 7- 41.

Simatupang, Paula. Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Sugiyono. 2003. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suwarno, 2007. Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah daerah dengan Finansial Rasio terhadap Neraca Pemerintah Daerah. *Materi Orasi Ilmiah untuk Pengukuhan Widyaiswara Utama*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
*Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan  
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

-----, 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No. 24 Tahun  
2005).* Jakarta: Sinar Grafika.

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

[www.ditjenperimbangankeuangan.go.id](http://www.ditjenperimbangankeuangan.go.id)